

eJournal Administrasi Negara, 3 (4) 2015: 1849- 1861

ISSN 0000-0000, ejournal.an.fisip-unmul.org

© Copyright 2015

**STUDI TENTANG PENGAWASAN REKLAME OLEH DINAS
PENDAPATAN, PENGELOLAAN, KEUANGAN DAN ASET
DI KOTA BONTANG**

Sudarman

**eJournal Administrasi Negara
Volume 3, Nomor 4, 2015**

HALAMAN PERSETUJUAN PENERBITAN ARTIKEL EJOURNAL

Artikel eJournal dengan identitas sebagai berikut:

Judul : **Studi Tentang Pengawasan Reklame Oleh Dinas
Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset di Kota
Bontang**

Pengarang : Sudarman

NIM : 0802015214

Program Studi : Administrasi Negara

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

telah diperiksa dan disetujui untuk dionlinekan di eJournal Program Studi
Administrasi Negara Fisip Unmul.

Samarinda, November 2015

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Anthonius Margono., M.Si
NIP. 19561202 198103 1 001

Dr. Santi Rande., M.Si
NIP. 19751001 2006004 2 005

Bagian di bawah ini

DIISI OLEH PROGRAM STUDI

Identitas terbitan untuk artikel di atas

Nama Terbitan : eJournal Administrasi Negara	KETUA PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA <u>Drs. M.Z. Arifin, M.Si</u> NIP. 19570606 198203 1 025
Volume : 3	
Nomor : 4	
Tahun : 2015	
Halaman : 1849 – 1861 (Ganjil)	

Mahasiswa Program Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik, Universitas Mulawarman. darmanyayand@gmail.com

STUDI TENTANG PENGAWASAN REKLAME OLEH DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN, KEUANGAN DAN ASET DI KOTA BONTANG

SUDARMAN¹

Abstrak

Sudarman, Studi Tentang Pengawasan Reklame Oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan Dan Aset Di Kota Bontang dibawah bimbingan Bapak Dr, Anthonis Margono, M.Si dan Dr. Ibu Santi Rande, S.Sos., M.Si

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengawasan reklame oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset di Kota Bontang dan untuk mengetahui apa saja faktor penghambat dan pendukung pengawasan reklame oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset di Kota Bontang. Jenis penelitian yang dilakukan termasuk deskriptif kualitatif. Key informannya yaitu Kepala Bidang Pendapatan dan Kepala Seksi Penilaian DPPKA, informannya yaitu pegawai DPPKA yang tugasnya berhubungan dengan masalah yang diteliti serta informan lainnya yaitu masyarakat yang sedang melakukan pembayaran pajak reklame. Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan reklame oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset di Kota Bontang melalui penelitian dan observasi dari pendataan yang di lakukan oleh berbagai bidang yang ada di DPPKA sudah optimal. Karena adanya bantuan yang di berikan dari Satuan Polisi Pamong Praja dan masyarakat terkait, dan dengan diberikannya sanksi tegas dari penegak hukum kepada pihak yang melakukan pelanggaran sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah, sehingga dapat memberikan efek jera kepada pelaku pelanggaran tersebut. Namun kenyataan dilapangan ternyata upaya tersebut belum terlaksana dengan baik, karena masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak yang disebabkan banyak wajib pajak yang belum mengetahui isi dari peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 13 Tahun 2012 tentang pajak Daerah.

Kata Kunci: Efektivitas, Pengawasan, Pajak Reklame.

Mahasiswa Program Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Mulawarman. darmanyand@gmail.com

PENDAHULUAN

Dalam era otonomi daerah sekarang ini dimana daerah mempunyai kesiapan dan kekuasaan yang berbeda-beda dalam sumber dana dan sumber daya masyarakatnya. Daerah berhak mengatur rumah tangganya sendiri tanpa campur tangan pemerintah pusat. Oleh karena itu harus menasionalisasikan pengeluaran dan penerimaan serta manajemen keuangan disekitar jajaran birokrasi..

Sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 tujuan Bangsa Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Memajukan kesejahteraan umum berarti memajukan suatu tingkat kehidupan masyarakat secara optimal dan memenuhi kebutuhan dasar kehidupan manusia.

Untuk mengatasi hal tersebut maka pemerintah harus mencari sumber pendanaan lain sebagai ganti. Peningkatan penerimaan Negara dan efisiensi pengeluaran Negara dalam APBN dimaksudkan agar peranan tabungan pemerintah di dalam anggaran pembangunan Negara dapat semakin meningkat. Satu dari sekian upaya untuk meningkatkan penerimaan Negara, terutama diluar minyak dan gas bumi adalah dengan mengintensifkan pemungutan pajak.

Pajak merupakan sumber penerimaan dalam negeri yang utama, dengan terjadinya berbagai krisis baik ekonomi, moneter, maupun politik yang berdampak luas bagi seluruh rakyat Indonesia, maka semakin meningkat kesadaran dan tuntutan rakyat terhadap dampak negatif dari utang dan bantuan luar negeri. Upaya untuk mengurangi atau menghilangkan utang dan bantuan luar negeri hanya mungkin apabila penerimaan pajak dapat ditingkatkan sedemikian rupa untuk menggantikan penerimaan luar negeri tersebut. Dengan demikian, tampaklah betapa pentingnya peningkatan segala daya dan upaya untuk memacu peningkatan penerimaan pajak sesuai dengan yang diharapkan.

Pemerintah Daerah membutuhkan biaya dan dana untuk pembangunan daerah. Dalam rangka mendukung perkembangan otonomi daerah yang nyata, dinamis serasi dan bertanggung jawab, pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah yang bersumber pada pendapatan asli daerah itu sendiri, khususnya yang berasal dari pajak daerah, pengaturannya perlu lebih ditingkatkan lagi.

Diantara berbagai sumber pendapatan daerah tersebut, maka hasil pajak dan retribusi daerah memegang peranan penting. Salah satunya pajak daerah tersebut berasal dari pajak reklame. Berbicara mengenai pajak reklame tentunya tidak terlepas dari kaitannya dengan lingkungan, yang mana dalam hal ini penulis khususnya pada kota Bontang. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor

13 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah, bagian keempat pajak reklame pasal 18 ayat 1 dengan nama pajak reklame, dipungut pajak atas setiap penyelenggaraan reklame. Pajak reklame merupakan salah satu jenis pajak, yang menimbulkan permasalahan yang sering dijumpai dan kerap dihadapi pemerintah Kota Bontang.

Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengawasan reklame oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset di Kota Bontang ?
2. Apa saja faktor penghambat dan pendukung dalam pengawasan reklame oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset di Kota Bontang ?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengawasan reklame oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset di Kota Bontang.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor penghambat dan pendukung dalam pengawasan reklame oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset di Kota Bontang.

Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Teoritis:
 - a. Untuk menambah dan memperdalam serta mengembangkan pengetahuan penulis serta sebagai latihan dalam menuangkan hasil pemikiran dan penelitian sesuai dengan ketentuan penulis karya ilmiah di Universitas Mulawarman.
 - b. Sebagai proses pembelajaran peneliti dalam menganalisis masalah secara ilmiah
 - c. Menemukan jawaban atas masalah atau kendala-kendala yang ada dalam pengawasan reklame oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset di Kota Bontang.
2. Kegunaan Praktis :
 - a. Sebagai bahan informasi bagi pegawai Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset di Kota Bontang dalam pengawasan reklame di Kota Bontang.
 - b. Sebagai sumbangan pemikiran kepada Pemerintah Daerah Kota Bontang pada umumnya dan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset di Kota Bontang khususnya.
 - c. Sebagai bahan referensi bagi masyarakat yang memerlukan informasi tentang reklame di Kota Bontang.
 - d. Untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

KERANGKA DASAR TEORI

Pengertian Pengawasan

Shaleh (dalam Kaligis, 2006:42), pengawasan adalah sesuatu yang bersifat kodrati yang diperlukan dalam kehidupan manusia maupun dalam kehidupan organisasi. Pengawasan adalah bagian dari mekanisme sistem suatu mata rantai yang mempunyai peran tertentu.

Menurut Manullang (2002:173), mengatakan bahwa : “Pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan suatu pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.

Jenis-Jenis Pengawasan

Adapun jenis-jenis pengawasan menurut Manullang (2002:174) yaitu sebagai berikut :

1. Menurut Waktu Pelaksanaan
2. Menurut Cara Pelaksanaan
3. Menurut Subyek Pelaksanaannya

Teknik-Teknik Pengawasan

Dalam Siagian (2001:259) untuk mengetahui dengan jelas apakah penyelenggara berbagai kegiatan operasional sesuai dengan rencana atau tidak, dan apakah terjadi deviasi atau tidak, manajemen perlu mengamati jalannya kegiatan operasional tersebut. Berbagai teknik yang dapat digunakan dalam pengawasan antara lain adalah :

- a. Pengamatan langsung atau observasi oleh manajemen untuk melihat sendiri bagaimana cara para petugas operasional dalam menyelenggarakan dan menyelesaikan tugasnya. Teknik ini dapat berakibat sangat positif dalam implementasi strategi dengan efisien dan efektif. Dikatakan demikian karena dengan pengamatan langsung berbagai manfaat dapat dipetik, seperti perolehan informasi “*on the spot*” bukan hanya tentang jalannya pelaksanaan berbagai kegiatan operasional, akan tetapi dengan demikian manajemen dapat segera “meluruskan” tindakan para pelaksana apabila diperlukan dan manajemen langsung dapat memberikan pengarahan tentang tata cara bekerja yang benar. Disamping itu dengan pengamatan langsung, para bawahan akan merasa diperhatikan oleh pemimpinnya sehingga dalam diri bawahan tidak timbul kesan bahwa pimpinan “jauh” dan “tidak terjangkau” oleh para bawahan tersebut. Kelemahan pengguna teknik ini terutama terletak pada kenyataan bahwa waktu manajemen yang sangat berharga itu akan sedikit tersita untuk melakukan kegiatan pengawasan dalam bentuk ini.

- b. Melalui laporan lisan atau tertulis dari Kepala Dinas DPPKA yang sehari-hari mengawasi secara langsung kegiatan para bawahannya. Dalam semua organisasi, penyampaian laporan dari seseorang bawahan kepada atasannya yang merupakan hal yang bukan hanya biasa terjadi akan tetapi merupakan keharusan. Dalam rangka pelaksanaan suatu strategi laporan yang memenuhi berbagai persyaratan, seperti : penyampaian secara berkala yang frekuensinya tergantung pada “kebiasaan” yang berlaku pada organisasi, dalam format yang sudah ditentukan, mengandung informasi yang bersifat kritikal yang berarti tidak hanya menyajikan segi-segi positif dari pelaksanaan kegiatan operasional akan tetapi juga situasi negatif yang perlu segera mendapat perhatian manajemen.
- c. Melalui penggunaan kuesioner yang respondennya adalah para pelaksana kegiatan operasional. Penggunaan kuesioner sangat bermanfaat apabila maksudnya untuk menggali informasi tentang situasi yang nyata dihadapi dilapangan dari sejumlah besar tenaga pelaksana kegiatan operasional. Kiranya relevan untuk menambahkan bahwa ada kalanya manajemen “segan” menggunakan instrumen ini dalam melakukan pengawasan karena, di samping memerlukan waktu yang tidak sedikit untuk menyusun berbagai pertanyaan yang dipandang relevan dengan untuk ditanyakan, juga tidak jarang terjadi bahwa jumlah responden yang mengembalikan kuesioner tidak cukup banyak sehingga informasi yang diperoleh pun hanya bersifat parsial yang ada kalanya kurang bermanfaat sebagai dasar untuk menarik kesimpulan tentang apakah strategi implementasikan dengan baik atau tidak.
- d. Wawancara. Apabila diperlukan wawancara dengan para penyelenggara berbagai kegiatan operasional pun dapat dilakukan dalam rangka pengawasan. Telah umum diketahui bahwa terdapat tiga bentuk wawancara, yaitu yang tidak terstruktur, yang terstruktur dan kombinasi keduanya. Jika manajemen akan menggunakan teknik ini sebagai instrument pengawasan dalam rangka implementasi strategi organisasi, manajemen yang bersangkutan harus memutuskan bentuk mana yang digunakan. Bentuk apapun yang digunakan, penting memperhatikan bahwa pimpinan hendaknya tidak “terjerumus” pada bias-bias tertentu, baik yang sifatnya pribadi, cultural maupun keperilakuan. Tegasnya dalam wawancara harus terjamin kebebasan pihak yang diwawancarai untuk menyampaikan informasi yang menyangkut masalah dan segi-segi negatif penyelenggaraan berbagai kegiatan operasional tanpa dihantui oleh ketakutan akan menerima ganjaran.

Fungsi Pengawasan

Menurut Belkoui (dalam Harahap, 2000:35), fungsi pengawasan pada dasarnya mencakup 4 unsur, yaitu :

1. Penetapan standar pelaksana.

2. Penentuan ukuran-ukuran pelaksana.
3. Pengukuran pelaksanaan nyata dan membandingkan dengan standar yang telah ditetapkan.
4. Mengambil tindakan koreksi yang diperlukan bila pelaksanaan menyimpang dari standar.

Pada hakekatnya fungsi pengawasan adalah mengontrol jalannya suatu prosedur kegiatan, dan menjadi pengarah agar tidak terjadi kekeliruan dan berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkan.

Langkah-Langkah Proses Pengawasan

Menurut Kadarman (2001:161) langkah-langkah proses pengawasan yaitu :

1. Menetapkan Standar
2. Mengukur Kinerja
3. Memperbaiki Penyimpanan

Pengertian Manajemen

Menurut Moleong (2005:57) teori merupakan seperangkat proposisi yang tertinggi secara sintaksis (yaitu mengikuti aturan tertentu yang dapat dihubungkan secara logis satu dengan yang lain dengan data dasar yang dapat diamati) dan berfungsi sebagai wahana untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena yang dihadapi, Karl Popper (dalam Muhadjir 2002:45) menjabarkan bahwa teori merupakan terkaan-terkaan informatif tingkat tinggi tentang semesta ini.

Fungsi-Fungsi Manajemen

Menurut Terry (2010:9), fungsi manajemen dapat dibagi menjadi empat bagian, yakni *planning* (perencanaan), *organizing* (pengorganisasian), *actuating* (pelaksanaan) dan *controlling* (pengawasan).

Reklame

Menurut Ridwan (2001:142), reklame adalah media periklanan yang biasa ditempatkan pada area yang sering dilalui, misalnya, sisi persimpangan jalan raya yang padat.

Jenis-Jenis Reklame

Adapun reklame yang telah dibagi menjadi beberapa bagian, dan jenis-jenis reklame diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Poster

2. Selebaran
3. Buklet

Dasar Hukum Pajak

Dasar hukum pemungutan pajak reklame Kota Bontang adalah Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 13 tahun 2012 tentang Pajak Daerah, dimana dalam hal ini disebutkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yang mana dalam penelitian ini penulis fokuskan pada daerah penelitian di Kota Bontang.

Objek Pajak Reklame

Objek pajak reklame adalah semua penyelenggara reklame. Penyelenggara yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Reklame papan/Billboard/Videotron/Megatron dan Sejenisnya.
- b. Reklame kain.
- c. Reklame melekat stiker.

Subjek pajak, Wajib pajak dan Dasar penenaan pajak

Sedangkan subjek pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame. Sedangkan yang menjadi wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame. Apabila reklame di selenggarakan oleh pihak ketiga maka yang menjadi wajib pajak reklame adalah pihak ketiga tersebut. Dalam menghitung besarnya jumlah pajak reklame adalah dengan cara mengalika dasar pengenaan pajak dengan tarif.

Definisi Konsepsional

Di dalam definisi konsepsional ini, penulis akan menjelaskan tentang masalah-masalah yang akan diteliti, agar dapat diketahui jelas kearah mana maksud dan tujuan dari penelitian dan memudahkan berbagai pihak dalam menginterpretasikan mengenai konsep-konsep sesuai dengan lingkungan penelitian ini. Selain itu untuk menghindarkan adanya penafsiran yang berbeda mengenai konsep penelitian yang dirumuskan. Berdasarkan pendekatan teori yang menjadi konsepsional variabel dapat di rumuskan sebagai berikut :

1. Secara umum pengawasan dapat diartikan sebagai perbuatan untuk melihat dan memonitor terhadap orang agar sesuai dengan kehendak yang telah ditentukan sebelumnya.
2. Menurut Moleong (2005:57) teori merupakan seperangkat proposisi yang tertinggi secara sintaksis (yaitu mengikuti aturan tertentu yang dapat dihubungkan secara logis satu dengan yang lain dengan data dasar yang

dapat diamati) dan berfungsi sebagai wahana untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena yang dihadapi.

3. Menurut Ridwan (2001:142), reklame adalah media periklanan yang biasa ditempatkan pada area yang sering dilalui, misalnya, sisi persimpangan jalan raya yang padat.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian deskriptif kualitatif, yaitu metode dengan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian seseorang, pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

Fokus Penelitian

1. Pengawasan reklame oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset di Kota Bontang adalah :
 - a. Pengamatan langsung atau observasi.
 - b. Melalui laporan lisan atau tertulis.
 - c. Melalui penggunaan kuesioner.
 - d. Wawancara.
2. Faktor penghambat dan pendukung dalam meningkatkan pengawasan reklame oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset di Kota Bontang.

Sumber dan Jenis Data

Sumber Data dapat diperoleh dari Kepala Bidang Pendapatan dan Kepala Seksi Penilaian, Pegawai DPPKA dan masyarakat yang sedang melakukan pembayaran pajak reklame di Kota Bontang di mana peneliti dapat mengamati, bertanya atau membaca tentang hal-hal yang berkaitan dengan variabel yang diteliti. Sumber Data ada dua jenis yaitu :

1. Sumber Data Primer

Sumber Data Primer yaitu Sumber data Penelitian yang di peroleh secara langsung dari sumber asli, sebagai berikut :

- a. *Key informan* (Informasi Kunci) nya yaitu Kepala Bidang Pendapatan dan Kepala Seksi Penilaian DPPKA, dilakukan secara *Purposive sampling* yaitu menentukan sampel dengan pertimbangan tertentu yang memberikan data secara maksimal.
- b. Informannya yaitu Pegawai DPPKA yang tugasnya berhubungan dengan masalah yang ditelitidilakukan secara *Purposive sampling* yaitu menentukan sampel dengan pertimbangan tertentu yang memberikan data secara maksimal.

- c. Informan Lainnya yaitu masyarakat yang sedang melakukan pembayaran pajak reklame, yang dilakukan dengan *data accidental*. *Data accidental* adalah masyarakat yang secara kebetulan ada di daerah penelitian. (Sugiyono, 2004:60).
2. Sumber Data Sekunder
Sumber Data Sekunder adalah Data Penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip. Seperti data-data yang mendukung dari buku-buku yang sudah dipublikasikan maupun yang belum dipublikasikan. Untuk menunjang penelitian ini diambil dari dokumen-dokumen yang ada di DPPKA di Kota Bontang.

Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data tersebut, maka diperlukan adanya metode tertentu dalam pengumpulan data. Adapun metode pengumpulan datanya yaitu dengan menggunakan :

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*), artinya penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan teori dan data dari perpustakaan berupa buku-buku ilmiah, peraturan perundang-undangan dan dokumen yang ada hubungannya dengan ruang lingkup penelitian ini, yang dipergunakan sebagai landasan pemikiran dan pembahasan.
2. Penelitian Lapangan (*Field Work Research*), darinya penulis langsung mengadakan penelitian kelapangan dengan mempergunakan beberapa cara yaitu :
 - a. Observasi : yaitu pengamatan dan pencatatan secara langsung terhadap objek yang diteliti untuk mendapatkan data yang diperlukan.
 - b. Wawancara (*interview*), yaitu penulis mengadakan tanya jawab dengan beberapa responden untuk melengkapi keterangan-keterangan yang ada hubungannya dengan penelitian ini.
3. Penelitian dokumen atau dokumen *research* artinya penelitian terhadap seluruh dokumen atau arsip-arsip yang menyangkut masalah efektivitas pemungutan pajak reklame pada Dinas Pendapatan Daerah di Kota Bontang

Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis berusaha menggambarkan pengawasan reklame oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset di Kota Bontang. Karena penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, maka penulis menggunakan Analisis data deskriptif kualitatif. Sedangkan untuk menganalisa data kualitatif menurut Miles & A. Michael terjemahan Tjetjep Rohendi (2007:20),

HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN

Pengamatan Langsung atau Observasi

Pegawai melakukan penagihan bagi pengguna reklame yang tidak taat dalam membayar pajak. Penagihan dilakukan di lokasi pengguna reklame berada. Pengamatan langsung atau observasi dalam pengawasan reklame yang pegawai lakukan sudah baik. Pegawai yang melakukan pengawasan sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi bidang penagihan. Pegawai melakukan pengamatan kepada masyarakat yang memasang reklame liar dan tidak memiliki ijin yang dapat merusak estetika kota, bagi mereka yang melanggar akan diberikan surat teguran dan apabila mereka tidak merespon surat teguran itu maka akan dilakukan penindakan oleh penegak hukum yang sesuai dengan Peraturan Daerah No 13 Tahun 2012 di Kota Bontang.

Melalui Laporan Lisan atau Tertulis

Laporan lisan atau tertulis dari pengguna reklame harus di isi yang diberikan pegawai yaitu jenis pajak reklame yang di pakai, tempat pemasangan dan pajak yang harus dibayar. Masalah pengawasan dari beberapa pihak pegawai yang berwenang datang memantau reklame-reklame yang di pasang oleh masyarakat lain yang tidak melakukan izin dengan DPPKA.

Melalui Penggunaan Kuesioner

Kuesioner dalam pengawasan reklame di Kota Bontang biasanya dilakukan melalui pertanyaan kepada pengguna atau pendapat pengguna mengenai pemasangan reklame liar. Kuesioner harus di isi oleh pengguna reklame, yang biasa di lakukan dikantor DPPKA. Selama ini berdasarkan pengawasan yang telah dilakukan belum pernah terjadi adanya pemungutan liar dalam pajak reklame karena wajib pajak telah mengenali petugas pajak yang memang telah ditunjuk untuk melakukan pemungutan, dan rata-rata wajib pajak melakukan pembayaran di Kantor DPPKA secara langsung sehingga hal tersebut tidak akan memberikan celah untuk adanya pemungutan liar.

Wawancara

Pengguna reklame di wawancara menanyakan mengenai reklame. Yang wawancarai pegawai kami yang bertugas di lapangan. Yang dilakukan di tempat reklame pada saat pemasangan dan masyarakat sekitar. Wawancara dalam pengawasan reklame di Kota Bontang sudah dilakukan dengan baik.

Adapun pendapat lain dari pengguna reklame mengungkapkan bahwa pegawai DPPKA selalu mewawancarai pengguna, guna melakukan pengawasan reklame di Kota Bontang. Pegawai menanyakan pendapat pengguna mengenai hal-hal reklame yang di pasang liar oleh masyarakat. Pegawai melakukan seperti wawancara, razia dan penertiban reklame liar. Biasanya pegawai di bantu Satpol Pamong Praja. Di tempat yang biasa terdapat pemasangan. Wawancara yang dilakukan bertujuan baik bagi pengguna reklame.

Faktor penghambat dan pendukung dalam meningkatkan efektivitas pengawasan reklame di Kota Bontang

Faktor pendukungnya dengan bertambahnya jumlah penduduk yang memerlukan atau memakai reklame, maka akan bertambah pula subjek pajak reklame. Kebutuhan masyarakat untuk pelayanan reklame akan dilakukan pengawasan oleh Dinas yang terkait. Kepatuhan Masyarakat dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 13 tahun 2012 tentang Pajak Daerah dan Pemerintah Daerah dalam memenuhi besarnya Pajak Reklame dengan memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat.

Dalam pengawasan pajak reklame diperlukan koordinasi serta pengawasan dan pemungutan agar berdasarkan hukum/Peraturan Daerah. Perda tersebut dibuat sesuai dengan prinsip-prinsip pembuatan sebuah Peraturan Daerah, sehingga secara yuridis perda tersebut telah memiliki kekuatan hukum.

Faktor penghambat adalah kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembayaran pajak reklame, serta kurang pemahannya masyarakat terhadap arti dari pajak, dan juga masih kurangnya sarana dan prasarana. Serta kemampuan sumber daya manusia yang terbatas dan juga kondisi sosial ekonomi yang berbeda-beda.

Kesimpulan

Dari hasil penelitian, penyajian data dan pembahasan, maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengawasan reklame oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset di Kota Bontang adalah :

Melalui pengamatan langsung atau observasi hasilnya pengawasan yang dilakukan pegawai DPPKA terhadap pelaksanaan penyelenggara reklame sudah sesuai dengan tugasnya. Penyelenggara reklame di Kota Bontang, dikoordinasikan oleh DPPKA dengan surat keputusan pemerintah Kota Bontang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pajak Penyelenggara Reklame. Pelaksanaan pengawasan reklame di lapangan sudah semakin membaik karena dengan adanya bantuan dari pihak Satpol Pamong Praja dan Kepolisian sehingga pengawasan dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang ada. Namun masih ada kekurangan dalam melakukan pengawasan yaitu kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembayaran pajak reklame, kurang pemahannya masyarakat terhadap arti pajak, juga kurangnya sarana dan prasarana. Hal ini merupakan kelemahan dalam memenuhi fungsi pengawas sehingga reklame liar masih terus berkembang dan kurangnya penindakan yang diberikan pengguna reklame yang melanggar.

Saran

Setelah melalui beberapa macam penelitian, dengan rendah hati penulis merasa perlu untuk memberikan saran-saran yang mungkin bermanfaat kepada semua pihak. Adapun saran-saran yang akan penulis kemukakan adalah sebagai berikut :

1. Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset Kota Bontang, harus memberikan pengawasan lebih terhadap pengguna reklame yang melakukan pelanggaran, agar tidak ada lagi pengguna reklame yang belum memiliki ijin dari DPPKA
2. Kepada Kepala Bidang Pajak agar melakukan pengawasan secara terus menerus sehingga tak ada lagi pengguna reklame yang belum melaksanakan pembayaran pajak dan memberikan sanksi kepada pihak yang melakukan kesalahan.
3. Dalam melakukan pengawasan dan penertiban Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset bersama Satuan Polisi Pamong Praja agar terus melakukan patroli rutin setidaknya 1 bulan sekali. Sehingga dapat meminimalisir pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dan bisa mempengaruhi kesadaran wajib pajak agar melakukan kewajibannya untuk membayar pajak reklame baik langsung maupun dengan menggunakan media. Sehingga meningkatkan pengawasan reklame, agar penerimaan pajak reklame pada tahun-tahun berikutnya bisa lebih maksimal sehingga menambah pendapatan asli daerah kota Bontang.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar. 2005. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Remaja Rosdakarya : Bandung.
- Bayangkara, IBK. 2008. *Audit Manajemen Prosedur dan Implementasi Management Audit*. Salemba Empat : Jakarta.
- Kurniawan, Agung. 2005. *Transformasi Pelayanan Publik*. Pembaruan : Yogyakarta.
- Moleong, 2005. *Metodologi Kualitatif Edisi Revisi*. PT Remaja Rosdakarya: Bandung.
- Kaligis, O.C., 2006, *Perlindungan Hukum atas Hak Asasi Tersangka. Terdakwa dan Terpidana*. Alumni : Bandung.
- Pasolong, Harbani. 2007. *Teori Administrasi Publik*. Alfabeta : Jakarta.
- Rukman, Nana. 2006. *Model Manajemen Pendidikan Berbasis Komitmen*. Alfabeta : Semarang.

Sutrisno. 2007. *Manajemen Keuangan : Teori, Konsep dan Aplikasi*. Ekonisia : Yogyakarta.

Tika, P. 2008. *Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja Perusahaan*. Jakarta : Bumi Aksara.

Wijayanti, Irine Diana Sari. 2008. *Manajemen*, Mitra Cendikia Press : Yogyakarta.

Zuliyanti. 2005. *Pengaruh Pengembangan dan Pengawasan terhadap Efektivitas Kerja Bagian Produksi*. PT.Tri Cahya Purnama.

Dokumen-Dokumen :

Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Jakarta: Bineka Rineka.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah, Republik Indonesia.

Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 13 tahun 2012 tentang Pajak Daerah.

Sumber Internet

[http//Wikipedia.com](http://Wikipedia.com). *Pajak*. Internet. Diakses pada tanggal 23 Maret 2014.

Schein, 2008. Budaya Organisasi, (<http://www.majalahpendidikan.com/2011/04>), diakses tanggal 8 Januari 2013.